



UNIVERSITAS INDONESIA

KEDUDUKAN WAKIL MENTERI
DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA

TESIS

SAIFUL ANAM
1006829214

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JANUARI 2013



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI
DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA**

TESIS

**SAIFUL ANAM
1006829214**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
JAKARTA
JANUARI 2013**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI
DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

**SAIFUL ANAM
1006829214**

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN
JAKARTA
JANUARI 2013**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah Saya nyatakan dengan benar.

Nama : Saiful Anam

NPM : 1006829214

Tanda Tangan : 

Tanggal : 21 Januari 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Saiful Anam
NPM : 1006829214
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kedudukan Wakil Menteri Dalam Susunan
Organisasi Kementerian Negara

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Andhika Danesjvara, SH. M.Si. (.....)

Penguji : Dr. Tri Hayati, SH., MH. (.....)

Penguji : Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 21 Januari 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini sampai dengan selesai. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka mencapai gelar Magister Hukum Kenegaraan Universitas Indonesia. Saya sadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc**, selaku Pejabat Sementara Rektor Universitas Indonesia, juga kepada **Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri** Rektor Universitas Indonesia 2007 – 2012.
2. **Dr. Siti Hajati Hoesin S.H., M.H., C.N.** Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, juga kepada (Alm) **Prof. Safri Nugraha, SH., L.L.M., P.hD** mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya ingat betul Bapak memberikan semangat kepada kami baik pada saat pertemuan di Kampus Depok maupun Kampus Salemba pada saat awal Penerimaan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia.
3. **Dr. Andhika Danesjvara, SH. M.Si.** selaku Pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, sangat membantu dan mempermudah Penulis dalam proses melalui penulisan tesis ini. Terima kasih sekali lagi Pak Andhika.
4. **Dr. Tri Hayati, SH., MH.** dan **Dian Puji N. Simatupang, SH., MH.** selaku Penguji yang telah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan masukan yang konstruktif kepada Penulis, Bu Tri baik sekali, memberikan kemudahan-kemudahan kepada Penulis, tak lupa juga Pak Dian yang telah memberikan inspirasi serta melakukan koreksi terhadap proposal tesis saya pada saat kuliah Metode Penelitian Hukum, terima kasih Pak Dian.
5. Tak lupa Saya ucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh Staf Pengajar Program Pascasarjana Magister Hukum Univeristas Indonesia yang pernah mengajar dikelas diantaranya **Prof. Dr. Hasun Alrasyid, SH. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Prof. Dr. Benyamin Hoessein, SH. Prof. Dr. Arifin P. Soeriaatmadja S.H. Prof. Dr. Maria Farida Indrati S.H., M.H. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH. (Alm) Prof. Dr. Ramli Hutabarat, SH., MH. Prof. Abdul Bari Azed S.H., M.Hum. Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno M.A. Dr. Supandi S.H., M.Hum. Dr. Andhika Danesjvara S.H., M.Si. Dr. Jufrina Rizal S.H., M.A. Dr. Tri Hayati S.H., M.H. Dr. Fatmawati S.H., M.H. Dian Puji Simatupang S.H., M.H. Dr. Harsanto Nursadi S.H., M.Si. Muhamad Ramdan Andri Gunawan Wibisana S.H., LL.M., Ph.D. Dr. R. Bambang Prabowo Soedarso S.H., MES. Mustafa Fakhri S.H., M.H., LL.M. Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si. Fitriani Ahlan Sjarif S.H., M.H.** Terima kasih atas segala niat baik para ahli dibidangnya masing-masing, Saya doakan semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik.
6. Kepada seluruh staf sekretariat Magister Hukum Universitas Indonesia, **Watijan, Hari, Tono** dan yang lain-lain, terima kasih atas informasi-informasi kuliah dan tugas yang diberikan.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Hukum Kenegaraan seperti **Birham, Samudra, Amir, Irawan, Mardani, Rusdi, Amet, Armyn, Minan, Tony, Zenwen, Wiwit, Rasti, Bertha, Hany, Lina, Indah** serta angkatan kakak kelas dan adik kelas semuanya, semoga sukses kalian semua.
8. Serta semua orang yang telah mensupport dan membantu dalam proses perkuliahan baik langsung maupun tidak langsung, seperti **Dr. Ir. Farid Alfauzi, Agus Alfianto, Wuryan Hidayat, Zulfikar Reza, Rahmad Fauzi, Syafi', SH., MH** dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih bantuannya, akhirnya dapat menyelesaikan MHUI.
9. Terakhir terima kasih kepada kedua orang tua, kakak dan adik serta seluruh keluarga di Madura yang telah mendoakan siang dan malam, akhirnya saya dapat menyelesaikan MHUI. Juga kepada calon istriku tersayang Resti, cepet selesai kuliahnya dan sehat selalu, serta terima kasih juga kepada calon mertua, terima kasih supportnya.

Akhir kata kami berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu terlesainya tesis ini. Semoga tesis ini berguna bagi pengembangan ilmu Pengetahuan Hukum di Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Saiful Anam
NPM : 1006829214
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum dan Kehidupan Kenegaraan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah yang berjudul :

**KEDUDUKAN WAKIL MENTERI
DALAM SUSUNAN ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, megalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Februari 2013

Yang Menyatakan



(SAIFUL ANAM)

ABSTRAK

Nama : Saiful Anam
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi
Kementerian Negara

Tesis ini membahas tentang makna pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus dalam Kementerian tertentu, selain itu juga membahas Kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara serta perbandingannya dengan Amerika Serikat, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan terdiri dari 3 (tiga) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil tesis ini menyarankan adanya restrukturisasi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga kedudukan Wakil Menteri dalam Susunan Organisasi Kementerian Negara secara tegas posisi dan kedudukannya berada dimana.

Kata kunci :
Kedudukan Wakil Menteri, Susunan Organisasi, Kementerian Negara

ABSTRACT

Name : Saiful Anam
Study Program : Legal Studies
Title : Deputy Minister position within the organizational structure Ministry of State

This thesis discusses the meaning of the appointment of the Deputy Minister by the President in the event of a workload that requires special handling in a particular ministry, but it also discusses the status Deputy Minister in the Ministry of the organizational structure and its comparison with the United States, Russia, Malaysia, Canada and South Korea . This thesis uses the method of normative legal writing, to consist of three (3) approaches the approach to legislation (*statute approach*), conceptual approaches (*conceptual approach*), and the comparative approach (*comparative approach*). The results of this thesis suggest a restructuring of the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structure, so that the position of Deputy Minister in the Ministry of organizational structures and firmly position where the position is located.

Keywords:
Position of Deputy Minister, Organization, Ministry of State

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan dan Manfaat Penelitian	
1.3.1 Tujuan.....	9
1.3.2 Manfaat.....	9
1.4 Kerangka Teoritis	
1.4.1 Teori Kekuasaan dan Kewenangan.....	10
1.4.2 Teori Tentang Lembaga Eksekutif.....	14
1.5 Metode Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penelitian.....	21
BAB 2 PENGANGKATAN WAKIL MENTERI	
2.1 Dasar Hukum Pengangkatan Wakil Menteri.....	24
2.1.1 Pengangkatan Wakil Menteri Hak Perogratif Presiden.....	57
2.1.2 Pengangkatan Wakil Menteri dalam Kondisi Tertentu.....	60
2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri Tidak Semua Kementerian.....	68
2.1.3 Pengangkatan Wakil Menteri Beraspek Politik dan Hukum.....	72
2.2 Masa Jabatan Wakil Menteri.....	82
2.2.1 Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi.....	85
2.2.1 Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.....	88

2.3	Pertanggungjawaban Wakil Menteri.....	91
2.3.1	Sifat Pertanggungjawaban Wakil Menteri.....	94
2.3.2	Pertanggungjawaban Wakil Menteri di bidang Politik.....	95
2.3.3	Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Hukum.....	96
2.3.4	Pertanggungjawaban Wakil Menteri dibidang Moral.....	97
2.4	Pemberhentian Wakil Menteri.....	91
2.4.1	Masa Jabatan Berakhir.....	100
2.4.1	Sebelum Masa Jabatan Berakhir.....	101
BAB 3 KEDUDUKAN WAKIL MENTERI		
3.1	Tugas dan Wewenang Wakil Menteri.....	106
3.1.1	Jenis Kewenangan Wakil Menteri.....	111
3.1.2	Sumber Kewenangan Wakil Menteri.....	118
3.1.3	Bentuk Kewenangan Wakil Menteri.....	122
3.1.2	Problematika Kewenangan Wakil Menteri.....	127
3.2	Struktur Organisasi Kementerian Negara.....	131
3.2.1	Struktur Organisasi Kementerian Negara menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	135
3.2.2	Struktur Organisasi Kementerian Negara berdasarkan di Lapangan.....	140
3.2.3	Problematika Posisi Wakil Menteri dalam Struktur Organisasi Kementerian Negara.....	148
3.3	Jenjang Kepangkatan dan Golongan Wakil Menteri.....	153
3.3.1	Jabatan Wakil Menteri adalah Karir dan Non Karir.....	157
3.3.2	Pangkat dan Golongan Wakil Menteri.....	160
3.3.3	Wakil Menteri membentuk Kepangkatan dan Golongan baru.....	163
3.3.4	Hak Keuangan dan Fasilitas Wakil Menteri.....	166
3.4	Kedudukan Wakil Menteri.....	170
3.4.1	Kedudukan Wakil Menteri terhadap Presiden.....	173
3.4.2	Hubungan Wakil Menteri dengan Presiden.....	174
3.4.3	Kedudukan Wakil Menteri terhadap Menteri.....	176
3.4.4	Hubungan Wakil Menteri dengan Menteri.....	177

3.4.5 Kedudukan Wakil Menteri terhadap Sekretariat Jenderal/Kementerian.....	179
3.4.6 Hubungan Wakil Menteri dengan Sekretariat Jenderal/Kementerian.....	181

BAB 4 PERBANDINGAN KEDUDUKAN WAKIL MENTERI DI BERBAGAI NEGARA

4.1 Amerika Serikat (<i>Undersecretary</i>).....	191
4.2 Rusia (<i>Deputy Minister</i>).....	204
4.3 Malaysia (<i>Deputy Minister/Timbangan Menteri</i>).....	213
4.4 Kanada (<i>Deputy Minister</i>).....	220
4.5 Korea Selatan (<i>Vice Minister</i>).....	227

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan.....	237
5.2 Saran	238

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.....	240
B. Makalah dan Jurnal.....	253
C. Media Cetak.....	254
D. Internet.....	255
E. Peraturan Perundang-Undangan.....	259

LAMPIRAN

- A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- B. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
- C. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara

- D. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
- E. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara
- F. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri. Peraturan Presiden
- G. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara
- H. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara.
- I. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi tugas dan fungsi Eselon 1 Kementerian Negara
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
- L. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
- M. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
- N. Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009
- O. Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011
- P. Keputusan Presiden Nomor 65/M Tahun 2012
- Q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya Bagi Wakil Menteri

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Konfigurasi Politik Terhadap Karakter Produk Hukum.....	73
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Kementerian Negara Berdasar Pada UU 39 Tahun 200....	139
Tabel 3.2 Struktur Organisasi Model Pertama.....	141
Tabel 3.3 Struktur Organisasi Model Kedua.....	142
Tabel 3.4 Struktur Organisasi Model Ketiga.....	143
Tabel 3.5 Struktur Organisasi Model Keempat.....	143
Tabel 3.6 Struktur Organisasi Model Kelima.....	144
Tabel 3.7 Struktur Organisasi Model Keenam.....	145
Tabel 3.8 Struktur Organisasi Model Ketujuh.....	146
Tabel 3.9 Struktur Organisasi Model Kedelapan.....	146
Tabel 3.10 Struktur Organisasi Model Kesembilan.....	147
Tabel 3.11 Jenjang, Pangkat dan Golongan PNS.....	154
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Wakil Menteri US.....	199
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Wakil Menteri Rusia.....	213
Tabel 4.3 Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (dua).....	219

Tabel 4.4	
Struktur Organisasi Wakil Menteri Malaysia (satu).....	219
Tabel 4.5	
Struktur Organisasi Wakil Menteri Kanada.....	227
Tabel 4.6	
Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 2 (dua).....	234
Tabel 4.7	
Struktur Organisasi Wakil Menteri Korea Selatan 1 (satu).....	235
Tabel 4.8	
Perbandingan Kedudukan Wakil Menteri Indonesia, Amerika, Rusia, Malaysia, Kanada dan Korea Selatan.....	236

